

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN KOREA UTARA

Pada bab ini, penulis akan berfokus pada perkembangan dinamika hubungan luar negeri Amerika Serikat dan Korea Utara berdasarkan alur pikir urutan kronologis peristiwa dari masa ke masa, mencakup kepentingan, arah kebijakan, eskalasi konflik, perjanjian serta upaya perdamaian yang berdampak signifikan pada hubungan kedua negara pada saat ini.

2.1 Latar Belakang Historis Korea Utara

Awalnya, sebelum Korea Utara terbentuk sebagai sebuah negara. Amerika Serikat terlebih dahulu sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Korea, yakni pada masa Dinasti Joseon (baca: Choson) yang dibuktikan dengan adanya *The 1882 Treaty of Peace, Amity, Commerce, and Navigation*. Perjanjian tersebut kemudian diikuti dengan kedatangan utusan diplomatik Amerika Serikat ke daratan Korea pada tahun 1883. Hubungan keduanya terus bertahan hingga pada tahun 1905, Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang (*Russo-Japanese War*) membuat Jepang mengambil alih urusan luar negeri daratan Korea dan mengakhiri hubungan diplomatik tersebut. Pemutusan hubungan diplomatik ini dilakukan Jepang dalam upayanya untuk membendung usaha negara-negara Barat yang pada saat itu sedang berebut untuk memberi pengaruh dan menguasai perdagangan di wilayah Asia Timur, dalam hal ini tanpa terkecuali Korea. (Pruitt, 2019).

Lima tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1910, Jepang memulai 35 tahun periode kolonialisme terhadap daratan Korea. Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada tahun 1945 menandai berakhirnya Perang Dunia II sekaligus berakhirnya masa penjajahan Jepang di daratan Korea. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, Amerika Serikat menyerahi Dean Rusk—saat itu belum menjadi Sekretaris Negara Amerika Serikat dan Kolonel Angkatan Darat Charles “Tic” Bonesteel tanggung jawab untuk membuat garis perbatasan terhadap wilayah yang diduduki Amerika Serikat di Asia Timur. Dua orang inilah yang mengusulkan untuk membagi daratan Korea menjadi dua, dipisahkan oleh garis wilayah bernama *38th parallel* tanpa melibatkan satu pun perwakilan daratan Korea (The Infographics Show, 2018).

Daratan Korea terbagi menjadi dua zona kependudukan; Amerika Serikat di Selatan dan Uni Soviet di Utara. Amerika Serikat mendapat bagian selatan yang lebih modern dengan

industri ringan termasuk Kota Seoul. Uni Soviet mendapat bagian Utara yang memiliki industri berat dan didominasi oleh kelas pekerja seperti buruh juga petani. Awalnya pembagian daratan Korea direncanakan sebagai solusi 'sementara' demi mempermudah penjagaan dan mempersiapkan administrasi pemerintahan daratan Korea yang bebas merdeka pada waktunya. Namun, selama kurun waktu 1945-1948 Uni Soviet mendirikan rezim komunis di wilayah Utara dan menginstal militernya. Pengaruh paham komunisme yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia bersinkronisasi dengan baik dengan orang-orang di wilayah Utara yang didominasi kelas pekerja. Hasilnya, meskipun reunifikasi dan pemilihan umum sudah dijadwalkan oleh Amerika Serikat kepada PBB, partai-partai Komunis di Utara beserta Uni Soviet menolak usulan tersebut (Pruitt, 2019).

Amerika Serikat menginginkan kedua wilayah memiliki pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip demokrasi sedangkan Uni Soviet menginginkan seluruh daratan Korea memeluk paham komunisme. Kedua negara seharusnya bertemu pada tahun 1948 untuk membahas reunifikasi, tapi karena perbedaan pendapat tadi ditambah pesimisme akan tercapainya kesepakatan, akhirnya pertemuan tersebut tidak terjadi. Pada tahun 1948 kedua wilayah berdiri masing-masing, dimulai dari deklarasi kemerdekaan Korea Selatan (Republik Korea) pada tanggal 15 Agustus 1948 diikuti dengan pendirian Republik Rakyat Demokratik Korea Utara pada tanggal 9 September 1948 (Pruitt, 2019).

2.2 Sejarah Kronologis Gejolak Hubungan Amerika Serikat-Korea Utara

Berakhirnya Perang Dunia II membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi Amerika Serikat. Namun, peristiwa tersebut juga menjadi penanda dimulainya persaingan Amerika Serikat dengan Uni Soviet dan sekutu-sekutunya, terkhusus Korea Utara. Tensi yang meningkat antar dua kekuatan besar inilah yang menjadi cikal bakal masuknya Amerika Serikat dalam pusaran konflik dengan Korea Utara di masa sekarang. Ketakutan Amerika Serikat terhadap politik ekspansi Uni Soviet demi mengeksport paham komunisme ke seluruh dunia membuat Amerika Serikat mengambil kebijakan luar negeri yang populer disebut *containment* (bahasa: pembendungan) Kebijakan *containment* terdiri dari berbagai upaya mulai dari Doktrin Truman, *Marshall Plan*, dan salah satu aplikasi kebijakan *containment* yang sangat terkenal, yaitu Perang Korea (1950).

Perang Korea dimulai dengan invasi Korea Utara terhadap Korea Selatan pada tahun 1950 yang dimaksudkan untuk memperoleh kontrol atas wilayah Semenanjung Korea. Amerika Serikat merespon invasi Korea Utara dengan mengadopsi resolusi Dewan Keamanan

PBB (hasil perolehan suara 9-0) yang mengutuk peristiwa tersebut sebagai ‘pelanggaran terhadap perdamaian’. Saat itu, Dewan Keamanan PBB tidak memiliki perwakilan dari Uni Soviet, protes diajukan dan semakin keras setelah PBB menolak penempatan delegasi Tiongkok di Dewan Keamanan. Presiden Harry S. Truman dengan sigap membentuk pasukan militer gabungan di bawah komando yang diberi nama *Gen. Douglas MacArthur Commander of the U.N. forces* bersama dengan 15 negara lainnya. Perang pun meletus tidak terhindarkan selama tiga tahun dan mengorbankan lebih dari 2.5 juta orang (Pruitt, 2019).

2.2.1 Gejolak Hubungan Amerika Serikat-Korea Utara Era Perang Dingin

Situasi Perang Dingin antara dua kekuatan utama dunia, Amerika Serikat melawan Uni Soviet memperparah hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sementara Amerika Serikat, Jepang, dan sekutunya bekerjasama membantu Korea Selatan membangun kembali negaranya pasca perang. Di sisi lain, Korea Utara semakin dalam terpengaruh paham komunis dari Rusia dan Tiongkok. Korea Utara menikmati bantuan dari dua negara besar komunis dunia dengan meningkatkan pertumbuhan total industri yang mencapai rata-rata 39% dari tahun 1953-1960. Bahkan diakui sejarawan Charles K, Armstrong, pada masa itu pertumbuhan total industri Korea Utara adalah yang tertinggi di dunia (Jezard, 2017).

Perang Dingin terus berlanjut dengan berbagai peristiwa sejarah seperti Krisis Misil Kuba (1962), dan Perang Vietnam (1965-73). Tensi yang tinggi antara kedua kubu ditambah berbagai peristiwa seperti penangkapan kapal intelijen USS Pueblo milik Amerika Serikat oleh Korea Utara dan penembakan pesawat pengintai Amerika Serikat oleh Korea Utara yang menewaskan 31 orang warga negara Amerika semakin memperparah hubungan buruk keduanya. Tidak adanya akses bagi Amerika Serikat untuk berkomunikasi secara langsung dengan Korea Utara hingga tahun 1971 juga menjadi faktor yang membuat situasi semakin tidak nyaman bagi kedua negara (Porter, 2019).

2.2.2 Upaya Pendekatan Diplomatis melalui Perjanjian Perdamaian

Berdasarkan data yang dihimpun serta analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa langkah diplomatis yang diupayakan Amerika Serikat melalui inisiasi pembentukan perjanjian perdamaian. Penandatanganan perjanjian gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan merupakan salah satu bukti peran Amerika Serikat dalam upaya meredam konflik yang terjadi di kawasan negara tersebut. Penandatanganan perjanjian ini dapat mengembalikan situasi kedua negara pada saat itu kembali seperti kondisi sebelum perang. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian gencatan

senjata ini diantaranya adalah Letnan Jendral Angkatan Darat Amerika Serikat William Harrison Jr. dengan kapasitasnya sebagai perwakilan Komando Perserikatan Bangsa Bangsa, Nam II dengan kapasitasnya sebagai Jendral Tentara Rakyat Korea (*General of Korea People's Army*) serta Tentara Sukarelawan Rakyat Tiongkok (*Chinese People's Volunteers*). Terdapat hasil signifikan dari penandatanganan perjanjian gencatan senjata ini yang dampaknya masih ada hingga saat ini, yaitu munculnya zona demiliterisasi (DMZ) yang membentang dari lintang 38 derajat Utara (National History Day, 1953).

Selain itu, tepatnya pada tahun 1985, Korea Utara juga menandatangani perjanjian *Non-Proliferation Treaty of Nuclear Weapons* (NPT). Gagasan besar serta esensi dari perjanjian ini adalah untuk meredam penyebaran kepemilikan senjata serta teknologi nuklir sekaligus mengkampanyekan kerja sama dalam penggunaan nuklir terbatas dalam kegiatan non-militer. Lebih lanjut, nantinya perjanjian ini diharapkan akan berujung pada pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh. Enam tahun kemudian, yaitu tahun 1991, menyusul berakhirnya Perang Dingin, Presiden Amerika Serikat H.W. Bush mengesahkan penarikan sebagian besar senjata nuklir Amerika Serikat di Korea Selatan yang telah secara diam diam disimpan selama lebih dari beberapa dekade sejak tahun 1958. Amerika Serikat lalu mulai mengupayakan pendekatan non-konfrontasi melalui pembukaan saluran komunikasi diplomatik dengan Pyongyang sebagai langkah antisipatif untuk meredam ambisi program senjata nuklir Korea Utara (Korea Peace Now, 2018).

Pada tahun 1994, Amerika Serikat kembali melakukan pendekatan diplomatis terhadap Korea Utara sepakat dengan penandatanganan perjanjian pembekuan program pengembangan senjata nuklir Korea Utara atau lebih dikenal dengan "*Agreed Framework*". Sebagai timbal balik atas komitmen dan kemauan Korea Utara dalam meredam ambisi pengembangan senjata nuklirnya, Korea Utara akan mendapat bantuan berupa berbagai kerja sama strategis dalam bidang ekonomi, suplai bahan bakar, serta pembangunan dua pembangkit listrik modern bertenaga air ringan (Morgan Patrick, 2009)

Pada tanggal 13 April 2008, tercatat Amerika Serikat dan Korea Utara mengalami kemajuan yang cukup progresif dalam meredam konflik di antara kedua negara tersebut. Diawali dengan intensi Korea Utara untuk menunjukkan kesungguhan komitmennya dalam pelucutan senjata nuklir dengan menghancurkan pabrik pendingin reactor atom utama di Yongbyon, Amerika Serikat merespon dengan mencoret Korea Utara dari daftar negara pensponsor terorisme. Hal ini cukup signifikan karena dengan tercoretnya Korea Utara dari

daftar tersebut memungkinkan berbagai perjanjian kerja sama dibidang ekonomi kembali dijalin antar kedua negara.

2.2.3 Eskalasi Gejolak Hubungan Amerika Serikat-Korea Utara

Terlepas dari berbagai upaya pendekatan diplomatis yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Korea Utara, terdapat rangkaian peristiwa eskalasi konflik yang terjadi antara kedua negara itu. Penulis akan memaparkan rangkaian peristiwa tersebut berdasarkan urutan kronologis terjadinya eskalasi konflik. Adapun tujuan penulis dalam menempatkan seluruh rangkaian peristiwa eskalasi konflik ini adalah agar dapat dipahami secara mendalam dan komprehensif.

Pada tahun 1993, *The International Atomic Energy Agency* menuduh Korea Utara melanggar perjanjian *Non-Proliferation Treaty of Nuclear Weapons* dengan menembakkan rudal balistik ke laut Jepang. Dilanjutkan pada tahun 1998, Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir yang ditembakkan kembali ke laut Jepang (Jezard, 2017).

Korea Utara tercatat melakukan langkah manuver yang mengejutkan dengan melepas perangkat pemantauan yang tadinya telah dipasang oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) di pembangkit listrik nuklir Yongbyon untuk memantau perkembangan program nuklir Korea Utara. Pada tahun 2003, upaya perdamaian dengan Korea Utara secara signifikan mengalami kemunduran ketika negara itu memutuskan untuk keluar dari the *Non-proliferation Treaty* (NPT). Hal ini menjadikan Korea Utara sebagai satu satunya negara yang pernah mengundurkan diri dari perjanjian tersebut (Bardzell, 2002)

Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George W. Bush melalui pidato resmi kepresidenan mengecam langkah pengunduran diri Korea Utara dalam perjanjian NPT. Secara cepat hal ini pun direspon dengan tegas oleh Korea Utara, menyebabkan tensi kembali meninggi di antara kedua negara tersebut.

Korea Utara tercatat melakukan uji coba peluncuran rudal sebanyak tujuh kali pada tahun 2006. Berdasarkan data yang dihimpun penulis, dalam kurun waktu ini Korea Utara mulai terlihat menunjukkan agresivitasnya dalam mendemonstrasikan kemampuan untuk mengembangkan senjata. Uji coba pertama senjata nuklir Korea Utara juga tercatat dilakukan dalam kurun waktu ini. Dari serangkain tes peluncuran rudal tersebut yang benar-benar berhasil adalah rudal jarak pendek (<1.000 km) dan jarak menengah (1.000-2.500 km). Adapun rincian data terkait keseluruhan peluncuran rudal tersebut adalah semua peluncuran dilakukan dari fasilitas peluncuran *Kittaeryong* dengan tipe rudal mencakup: Scud-C, Nodong-A, dan

Taepodong-2. Keseluruhan peluncuran rudal tersebut berhasil mencapai wilayah laut Jepang (Yoshida, 2006). Sementara Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) masih belum menunjukkan progress yang signifikan (Radchenko, 2006)

Pada kurun waktu 2003-2007, tercatat Korea Utara melakukan serangkaian tes peluncuran rudal. Hal ini menunjukkan inkonsistensi Korea Utara terhadap komitmennya dalam mengakhiri konflik terkait program nuklir Korea Utara. Namun demikian, eskalasi ini sempat terhenti ketika Korea Utara memutuskan untuk menghancurkan pembangkit listrik nuklir tenaga atom di Yongbyon pada 2008 yang juga berimbas pada dicoretnya Korea Utara dalam daftar negara pensponsor terorisme

Tepat setelah seluruh dunia mulai berpikir bahwa Korea Utara akhirnya bersikap kooperatif dan menunjukkan komitmen dalam menghentikan pengembangan program nuklirnya, pada tahun 2009 Korea Utara menyatakan bahwa mereka telah mengaktifkan kembali fasilitas nuklirnya. Tidak berhenti di situ, Korea Utara juga melakukan uji coba nuklir keduanya, yang dilakukan melalui peledakan bawah tanah pada Senin, 25 Mei 2009. Terkait dengan uji coba bawah tanah ini, Korea Selatan dan Jepang dibantu dengan pihak Survei Geologi Amerika Serikat mencatat aktivitas gempa sebesar 4.7 S.R.

Pada tahun 2013 Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir ketiganya, menunjukkan kepada dunia akan kesungguhan negara tersebut dalam mengembangkan senjata nuklir. Uji coba nuklir ketiga Korea Utara ini kembali dilakukan melalui uji coba bawah tanah. *China Earthquake Networks Center* mencatat aktivitas seismik gempa bumi sebesar 5.7 S.R. Menanggapi hal ini Jepang mengadakan pertemuan darurat Perserikatan Bangsa Bangsa pada 12 Februari 2013 serta Korea Selatan meningkatkan status kewaspadaan militernya (Broad, 2013)

Korea Utara terus membuat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan eskalasi konflik. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir keempat yang mereka klaim sebagai bom hidrogen, yaitu sebuah tingkatan bom yang mempunyai dampak kekuatan dan daya letak melebihi bom atom fisi biasa. Pernyataan ini sangat mengejutkan dunia global sekaligus meningkatkan tensi konflik di kawasan negara tersebut. Kemajuan program senjata nuklir tidak berhenti sampai di situ, sebaliknya hal itu semakin besar dan semakin mengalami perkembangan yang signifikan (Gibson, 2017)

2.3 Sejarah dan Profil Singkat Amerika Serikat

Amerika Serikat benar-benar memainkan peran vital dalam melawan serta meredam ambisi Korea Utara dalam mengembangkan program nuklirnya dari waktu ke waktu. Untuk menjelaskan awal mula keterkaitan Amerika Serikat dalam konflik dengan Korea Utara, penulis percaya penjelasan historis dari negara ini perlu dijelaskan terlebih dahulu secara detail dan komprehensif.

Amerika Serikat (bahasa Inggris: *United States of America*) adalah sebuah negara di kawasan Amerika Utara dengan luas wilayah sebesar 9.833.517 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 326.625.791 jiwa (2017). Amerika Serikat berbatasan langsung dengan Kanada di sebelah Utara dan Meksiko di sebelah Selatan. Bagian Timur Amerika Serikat menghadap ke Samudra Atlantik lalu bagian Barat menghadap ke Samudra Pasifik. Secara geografis uniknya Amerika Serikat juga memiliki wilayah berdaulat di belahan bumi lain yang terpisah dari daratan Amerika Serikat yaitu negara bagian Alaska di sebelah ujung laut benua Amerika Utara dekat Rusia dan negara bagian Hawaii di wilayah Samudra Pasifik. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai suku bangsa/etnis, antara lain: kulit putih 76.5%, kulit hitam 13.4%, 5.9% Asia, 2.7% multirasial, Indian Amerika 1.3%, dan orang pulau Pasifik 0.2% (Programme, 2018).

Amerika Serikat adalah negara Republik Konstitusional Federal. Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan Republik yang dipimpin oleh Presiden dengan masa jabatan empat tahun satu periode dan maksimal menjabat dua periode. Presiden Amerika Serikat berperan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Nasional Amerika Serikat (*Commander-in-Chief*). Bentuk negara Federal berarti wilayah di Amerika Serikat terbagi ke dalam 50 negara yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur.

Pada awal berdirinya, Amerika Serikat merupakan wilayah 13 koloni Inggris; Koloni Connecticut, Koloni Delaware, Provinsi Georgia, Provinsi Maryland, Provinsi Massachusetts Bay, Provinsi New Hampshire, Provinsi New York, Provinsi New Jersey, Provinsi North Carolina, Provinsi Pennsylvania, Koloni Rhode Island dan Providence Plantation, Provinsi South Carolina, Serta Koloni dan Dominion Virginia. Ketiga belas koloni inilah fondasi pembentukan negara Amerika Serikat yang tercatat sebagai wilayah kolonial pertama yang sukses melawan praktik penjajah Eropa melalui peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Amerika tahun 1765-1783 (Beck, Black, Krieger, Naylor, & Shabaka, 2003, hal. 640-641).

Semangat *Manifest Destiny* yang meyakini Amerika Serikat ditakdirkan untuk meluas melintasi benua; menjadi negara adidaya, mendorong Amerika Serikat untuk terus mengembangkan pengaruhnya di dunia internasional dan meningkatkan perekonomian serta militer dalam negeri demi menunjang keyakinan tersebut. Kemenangan Amerika Serikat pada Perang Spanyol-Amerika (1898), juga keterlibatannya di Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945), lalu Perang Dingin dengan Uni Soviet (1947-1991), hingga permasalahan-permasalahan dunia internasional di abad ke-21 menunjukkan betapa besar peran Amerika Serikat dalam perkembangan sejarah dunia.

2.4 Guam; *Unincorporated Territory* Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik

Guam adalah sebuah pulau di bagian barat Samudra Pasifik yang merupakan salah satu wilayah *unincorporated territory* Amerika Serikat. Konsep *unincorporated territory* merupakan konsep wilayah khusus yang dimiliki Amerika Serikat. Wilayah ini merupakan wilayah yang di organisasi oleh pemerintahan Amerika Serikat, menjalankan hukum Amerika Serikat, memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, memakai mata uang dollar Amerika Serikat, namun tidak berada di bawah hukum negara bagian Amerika Serikat. Biasanya wilayah *unincorporated territory* terletak di daerah yang jauh dari Amerika Serikat atau hanya berupa gugusan kepulauan. Penduduk wilayah ini mendapatkan hak yang sama dengan penduduk Amerika Serikat pada umumnya.

Sampai saat ini ada sekitar 13 wilayah *unincorporated territory*, antara lain American Samoa, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Kepulauan Baker, Kepulauan Howland, Kepulauan Jarvis, Atol Johnston, Karang Kingman, Atol Midway, Kepulauan Navassa, dan Kepulauan Wake. Wilayah ini dipimpin oleh gubernur secara otonomi, memiliki perwakilan di *Congress* dan *House of Representative*, mendapatkan hak yang sama dengan perwakilan negara bagian kecuali keikutsertaan dalam pemungutan suara (*voting*).. Amerika Serikat berdaulat penuh terhadap ke-13 wilayah *unincorporated territory* tersebut (United States General Accounting Office, 1997).

2.4.1 Selayang Pandang Sejarah Guam

Dalam sub bab ini, penulis akan memaparkan serta menyajikan data mengenai Guam yang berdasarkan latar belakang historisnya hanya merupakan sebuah kepulauan yang terletak di perairan Pasifik hingga sekarang menjadi milik Amerika Serikat dengan segala peran strategisnya. Adapun untuk detail peran Guam dalam konteks hubungan Amerika Serikat

dengan Korea Utara sebagai penghadang agresivitas nuklir Korea Utara akan dijelaskan pada Bab III.

Guam merupakan bagian wilayah kolonial Eropa, sama halnya dengan Amerika Serikat. Diceritakan bahwa kontak pertama Guam dengan Eropa terjadi ketika tiga kapal ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan pada tanggal 6 Maret, 1521 mendarat di Guam dalam perjalanannya untuk melintasi Samudra Atlantik dan Pasifik (Pacific Worlds, 2003). Pada kunjungan pertamanya, Spanyol tidak langsung menganeksasi Guam karena kondisi awak kapal yang sangat buruk membuat mereka harus kembali ke Eropa. Baru pada abad ke-17 Guam dijajah oleh Spanyol. Orang-orang asli Guam, yaitu Suku Chamorros diperkenalkan dengan budaya barat, agama Kristen Katolik, dan bahasa Spanyol. Pada masa inilah Spanyol mulai mendirikan pelabuhan beserta pangkalan militer yang membuat Spanyol mengontrol pemerintahan di wilayah Guam (Guam Online, 2012).

Memasuki akhir abad ke-19, ketika Amerika Serikat memenangkan Perang Spanyol-Amerika (1898), Guam diserahkan Spanyol kepada Amerika Serikat melalui Traktat Paris (*The Treaty of Paris*). Sejak masa inilah, Guam secara resmi berada di bawah kedaulatan Amerika Serikat. Posisi strategis Guam yang berada di Samudra Pasifik dimanfaatkan Amerika Serikat untuk berbagai keperluannya di Asia mulai dari menjadikan Guam sebagai jalur telegraf ke Filipina, pelabuhan bagi kapal-kapal Amerika Serikat, dan bagian penting Rencana Perang Oranye melawan Jepang (Rogers, 1995, hal. 135-136).

Guam adalah wilayah padat penduduk yang memiliki jumlah penghuni lebih dari 160.000 orang yang dengan total GDP per kapita mencapai US\$ 35.400, menjadikannya negara kepulauan paling maju di Mikronesia. Sebagai perbandingan, tetangga Guam, Kepulauan Mariana Utara yang juga merupakan wilayah *unincorporated territory* Amerika Serikat hanya memiliki GDP per kapita sebesar US\$ 16.800. Selain itu, Kiribati, negara dengan total penduduk terbanyak di Mikronesia hanya memiliki GDP per kapita sebanyak US\$ 1.500, sehingga Guam dapat dikatakan sebagai negara termaju di salah satu kawasan termiskin di dunia (Wendover Productions, 2018).

Perekonomian Guam bisa semaju ini tidak lepas dari lokasinya yang strategis. Signifikansi nilai strategis Guam terletak pada lokasi dan keadaan topografinya. Memiliki wilayah dengan panjang sekitar 46 km dan lebar 36 km. Guam merupakan satu-satunya kepulauan di Samudra Pasifik dengan luas wilayah yang cukup untuk dibangun pelabuhan serta bandara utama. Meskipun berjarak 8.000 mil dari Washington, DC, Guam hanya berjarak 3.300

mil dari Hawaii Barat, 1.500 mil dari Filipina, dan 1.550 mil dari Jepang. Bagi kebanyakan turis dari negara-negara Samudra Pasifik seperti Jepang, dari pada harus terbang jauh selama tujuh jam ke Hawaii atau 10 jam ke California, Amerika Serikat, mereka dapat mengunjungi Amerika Serikat hanya dengan tiga jam penerbangan ke Guam. Pusat perbelanjaan yang ada di Guam sama persis dengan yang ada di negara-negara bagian Amerika Serikat lainnya. Menjadikannya sangat populer bagi turis Asia untuk mendapatkan produk-produk Amerika dengan harga yang lebih murah dari pada membeli langsung di Asia (Wendover Productions, 2018).

Setiap tahunnya tercatat ada lebih dari 160 ribu turis yang mengunjungi Guam. Namun, sejak adanya ancaman serangan senjata nuklir dari Korea Utara, jumlah tersebut menurun drastis. Benjamin Cruz (2017), juru bicara badan legislatif Guam mengatakan:

When they were playing who's missile's bigger, we were the ones who suffered. Our tourism took a huge nosedive that month of August. We never saw so many news agency coming to Guam from countries that didn't even realize we existed because all of a sudden Kim Jong Un was threatening the American territory in the Pacific (Wendover Productions, 2018).

Sebagai negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor pariwisata, kenyataan bahwa kebanyakan turis langsung membatalkan kunjungan mereka ke Guam setelah adanya ancaman dari Korea Utara membuat perekonomian Guam menderita. Walaupun berada di wilayah yang terisolasi dan harus menderita karena meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat-Korea Utara, Guam dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah paling nasionalis di bawah kedaulatan Amerika Serikat. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa militer Amerika Serikat lah yang membebaskan Guam dari kejamnya okupasi Jepang pada saat Perang Dunia II. Bahkan disampaikan oleh Benjamin Cruz, hampir semua keluarga di Guam paling tidak memiliki satu kerabat yang mengabdikan diri di militer Amerika Serikat. Kenyataannya, satu diantara delapan penduduk Guam memang sedang atau pernah menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (Wendover Productions, 2018).

2.5 Dinamika Konflik Amerika Serikat dan Korea Utara dari Masa ke Masa

Serangkaian respon cepat dan serius diambil oleh Amerika Serikat melalui berbagai hal dalam berbagai tingkatan. Salah satunya dapat dilihat dalam pembentukan forum pertemuan yang mengumpulkan para pemimpin dari negara-negara kawasan untuk membahas tentang eskalasi pergerakan konflik Korea Utara. Pertemuan ini dikenal sebagai *Six Party Talk*, dimana pertemuan ini merupakan semacam bentuk forum perundingan negosiasi multilateral atau pertemuan yang berfokus pada pelucutan program nuklir Korea Utara. Pertemuan ini dihadiri

oleh Jepang, Cina, Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Korea Utara. Sebagai tanggapan atas tindakan lain atas ambisi senjata nuklir Korea Utara, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1718. Resolusi ini tentang sanksi keuangan yang akan memengaruhi stabilitas Korea Utara. Pada 2007, sebagai tanggapan atas resolusi AS, Korea Utara memutuskan untuk menghancurkan menara pendinginnya di reaktor atom utama Yongbyon.

Untuk memahaminya secara lebih mendalam, penulis akan memaparkan secara detail dan runtut mengenai bagaimana Amerika Serikat melakukan pendekatan terhadap Korea Utara dengan gaya kepemimpinan presiden di setiap eranya. Dalam hal ini mencakup masa kepemimpinan Presiden Clinton, Bush, Obama dan Trump.

2.5.1 Presiden Bill Clinton (1993-2001)

Pada masa Presiden Bill Clinton, tercatat bahwa Amerika Serikat mencoba untuk menggunakan langkah diplomatis dengan membujuk Korea Utara melalui *Geneva Agreed Framework* pada tanggal 21 Oktober 1994. Kesepakatan ini menyatakan bahwa Korea Utara akan menonaktifkan reaktor nuklirnya apabila Amerika Serikat dan Korea Selatan menjamin kebutuhan energi serta bahan bakar minyak Korea Utara. Seiring keterlibatan Jepang dalam kesepakatan ini, akhirnya terbentuklah sebuah program resmi bernama *Korea Peninsula Energy Organization* (KEDO) pada tahun 1995 yang tujuannya tidak hanya menghentikan pengembangan senjata nuklir Korea Utara tapi juga sekaligus menjadi wadah dialog politik dengan Korea Utara.

Namun, *Geneva Agreed Framework* nyatanya ditolak dan dinilai tidak memberikan hasil efektif dalam mencegah ekspansi program pengembangan senjata nuklir Korea Utara karena Korea Utara secara konsisten tetap melakukan manuvernya dengan terus menunjukkan upayanya dalam mengembangkan senjata nuklirnya. Terlebih lagi dalam masa administratif kepemimpinan Bill Clinton, diketahui bahwa pemimpin Korea pada saat itu yaitu Kim II-Sung belum lama telah meninggal. Hal ini yang turut membuat Amerika Serikat menyetujui kerangka perjanjian ini karena mereka memperkirakan bahwa Korea Utara akan runtuh selepas meninggalnya Kim II-Sung (Moore, 2008, hal. 11-12).

Amerika Serikat dan Korea Selatan pada tanggal 17 April 1996 mengusulkan diadakannya *Four Power Talks* antara Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Korea Utara. Pertemuan dilangsungkan pada bulan Desember 1997 di Jenewa. Pada kesempatan itu Korea Utara meminta Amerika Serikat untuk menarik seluruh pasukan militernya dari

Semenanjung Korea yang tentu saja ditolak oleh Amerika Serikat karena kondisi dan situasi masih dinilai belum aman (Wirengjurit, 2002).

2.5.2 Presiden George W. Bush (2001-2009)

Terpilihnya Presiden George W. Bush membawa perubahan pada politik luar negeri Amerika Serikat terhadap program senjata nuklir Korea Utara. *Agreed Framework* (1994) tidak lagi dijadikan kerangka kerja utama hubungan bilateral Amerika Serikat-Korea Utara. Presiden Bush juga melakukan peninjauan kembali kebijakan-kebijakan Clinton. Pada saat kunjungan Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung di bulan Maret tahun 2001, Presiden Bush menyampaikan *Sunshine Policy* yang selama ini dijalankan Korea Selatan sudah tidak lagi efektif dalam menghadapi permasalahan nuklir Korea Utara. Menurut Presiden Bush, Korea Utara tidak memiliki komitmen kuat terhadap *Sunshine Policy*. Presiden Bush terus menerus menekan Korea Utara untuk menghentikan pengembangan program senjata nuklirnya. Presiden Bush bahkan melabeli Korea Selatan sebagai ‘negara poros setan’ yang membuat hubungan kedua negara menjadi rumit untuk berunding bersama. Sejak masa pemerintahan Presiden Bush inilah kemudian *Six Party Talks* yang beranggotakan Amerika Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Rusia dibentuk (Moore, 2008).

2.5.3 Presiden Barrack Obama (2009-2017)

Setelah dua periode menjabat, Presiden George W. Bush digantikan oleh Presiden Barrack Obama pada pemilu tahun 2008. Terkait Korea Utara, Presiden Barrack Obama mulai melakukan manuver pendekatan *smart power*, yaitu dengan memberikan tekanan kepada Korea Utara untuk menghentikan pengembangan program senjata nuklirnya namun tetap menyediakan ruang bagi perundingan. Pada tanggal 8-10 Desember 2009, pejabat pemerintah Presiden Obama mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan pemerintahan Korea Utara di Pyongyang. Perwakilan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Stephen Bosworth memberikan mandat berupa surat dari Presiden Obama kepada Pemimpin Tertinggi Kim Jong-Il. Isi surat tersebut adalah kemungkinan diadakannya perundingan *Six Party Talks* terkait denuklirisasi Korea Utara dan ketersediaan Korea Utara mengikuti perundingan tersebut. Hasilnya, Korea Utara menolak. Terhitung ada empat kali uji coba nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Presiden Obama, yaitu pada tahun 2009, 2013, dan dua uji coba pada awal tahun 2017 (Al Syahrin, 2017, hal. 2-4).

2.5.4 Presiden Donald Trump (2017-2019)

Berdasarkan analisis penulis, meningkatnya ketegangan terkait senjata nuklir Korea Utara juga dipengaruhi oleh para aktor yang terlibat. Dalam hal ini, Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un, keduanya merupakan pemimpin dari masing-masing negara yang memiliki kepribadian "unik". Para pemimpin ini mengamankan kepentingan nasional mereka dengan cara mereka sendiri yang dinilai kurang diplomatis karena lebih menonjolkan sisi emosinya ketimbang kebijaksanaan seorang pemimpin.

Pada awal terpilihnya Trump, orang-orang bertanya-tanya 'semenyimpang' apakah politik luar negerinya di Asia Timur, khususnya yang berkaitan dengan denuklirisasi Korea Utara. Sejak awal, Presiden Trump kembali menekankan pentingnya kerja sama strategis antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang di Asia Timur. Semenanjung Korea dinilai sebagai permasalahan penting yang paling mengancam keamanan kawasan. Presiden Trump bahkan menyarankan Jepang dan Korea Selatan untuk memiliki senjata nuklir sebagai bentuk ancaman terhadap Korea Utara karena Presiden Trump merasa Jepang dan Korea Selatan terlalu mengandalkan Amerika Serikat dalam permasalahan kawasan (Fisher, 2016).

Menilik kebijakan-kebijakan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dalam menghadapi Korea Utara, Presiden Trump sebenarnya dihadapkan pada dua opsi, opsi diplomasi dan opsi militer. Masalah utama diplomasi Amerika Serikat-Korea Utara terletak pada substansi perundingan. Amerika Serikat ingin Korea menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya karena merasa Korea Utara mengancam perdamaian. Sebaliknya Korea Utara justru menghendaki Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki senjata nuklir terbanyak sekaligus terbesar di dunia memulai penghancuran senjata nuklir, baru kemudian Korea Utara menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya (Sriyono, 2004).

Aktor penting di kawasan Asia Timur selain negara-negara yang sudah penulis sebutkan tadi tentu saja adalah Tiongkok. Selama wacana denuklirisasi Korea Utara ini bergulir, Tiongkok selalu bersikap moderat dengan memerankan peran ganda. Mengecam tindakan Korea Utara sembari mendukung sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB pada Korea Utara tapi sekaligus mengendalikan Korea Utara dengan memanfaatkan program pengembangan senjata nuklir Korea Utara sebagai alat diplomasi untuk menyerang Amerika Serikat di kawasan Asia Timur (Al Syahrin, 2017, hal. 4). Pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang mencapai 6,8% pada kuartal ketiga tahun 2017 membuat pemerintahan

Presiden Trump menjadi was-was akan kemungkinan Tiongkok menjelma menjadi negara adidaya baru.

Hasilnya, agenda Perang Dagang yang dilancarkan Presiden Trump pada bulan Maret 2018 tentu saja justru memperburuk suasana, tidak hanya hubungan Tiongkok-Amerika Serikat terganggu, tapi juga penyelesaian permasalahan denuklirisasi Korea Utara (Smith, 2019). Presiden Trump justru menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang berhasil mengadakan pertemuan dengan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-Un. Tercatat keduanya bertemu sebanyak tiga kali, pertemuan pertama terjadi di Singapura pada tanggal 11 bulan Juni 2018 dalam rangka *US-North Korean Summit*, pertemuan kedua terjadi di Vietnam pada tanggal 27-28 Februari 2019, dan pertemuan terakhir dilaksanakan di Zona Demiliterisasi (*Demilitarised Zone/DMZ*) Korea Utara-Korea Selatan pada tanggal 30 Juni 2019. Isi ketiga pertemuan tersebut tentu saja berkaitan penghentian program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Namun hingga saat ini ketiga pertemuan tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan untuk mendenuklirisasi Korea Utara (Reuters, 2019).